



### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM PERCEPATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN (PIK)

**Muhammad Sapuan<sup>1)</sup>, Samad<sup>2)</sup>, Muhamad Aras<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina

*Email Correspondence:* samad@uis.ac.id

#### ABSTRAK

Pengangguran menjadi problematika serius yang menjadi sorotan dari pemerintahan pusat sampai dengan daerah. Dalam upaya menurunkannya program-program telah digulirkan dengan harapan bisa menyerap tenaga kerja, salah satunya program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Penelitian implementasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di Tanjung Pengapit Kelurahan Galang Baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor implementasi kebijakan telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana, keterlibatan masyarakat penerima manfaat dalam pelaksanaan program menggunakan sumber daya lokal kecuali yang tidak tersedia, pendanaan program tidak menemui kendala apapun karena program ini program pemerintah. Penilaian masyarakat pada umumnya baik Program PIK ini harusnya terus dilaksanakan karena banyak memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pembangunan infrastruktur dilingkungan tempat tinggal dan menyentuh kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Percepatan Pembangunan Infrastruktur*

#### ABSTRACT

Unemployment is a serious problem that is in the spotlight from central to regional governments. In an effort to reduce this, programs have been rolled out in the hope of absorbing workers, one of which is the Urban Village Infrastructure Acceleration (PIK) program. The research on the implementation of infrastructure development acceleration policies purposes to describe comprehensively and give recommendations as the research results of the Village Infrastructure Acceleration (PIK) program in Tanjung Pengapit, Galang Baru District. This research is qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. This research uses Edward III's theory. Based on the research, found that the implementation of the Village Infrastructure Acceleration (PIK) program has gone well and optimally. There are several factors which the implementation of the policy could be implemented by the implementing party. The involvement of the beneficiary community in implementing the program using local resources except those that are not available, the program funding has not encountered any obstacles because this program is under government program. The community's assessment is generally good. This PIK program should be continued because it provides many benefits to the community especially in infrastructure development for the living environment and touches on the socio-economic activities of the community as well.

**Keywords:** *Implementation, policy, infrastructure development acceleration*

#### PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat masih diperhadapkan dengan permasalahan pemerataan pembangunan dan disparitas sehingga tidak tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pembangunan itu tidak cukup dengan pemberdayaan masyarakat saja tapi peran pemerintah sangat besar terutama di bidang infrastruktur, dimana ketersediaan pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat seperti jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pelabuhan dan transportasi atas peningkatan aksesibilitas layanan publik, untuk membuka peluang peningkatan ekonomi dan sosial serta mempermudah pelayanan

dibidang kesehatan, pendidikan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pasar serta lapangan pekerjaan dibidang lain termasuk sektor-sektor baru, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Batam pelaksana Kebijakan Publik sebagaimana visinya yaitu *Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Yang Madani*, yang didalamnya berisi tentang Pengembangan Batam sebagai Bandar berstandar Internasional, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, tercapainya masyarakat sejahtera dan memiliki Kelembagaan Pemerintahan, Masyarakat serta suwasta yang Madani. Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah lambatnya pembangunan infrastruktur, oleh karena itu Pemerintah Kota Batam membuat program percepatan melalui pembangunan infrastuktur diwilayah kelurahan atau PIK, untuk itu kami ingin melihat implementasi kebijakan program ini di kelurahan dimana program ini dilaksanakan adanya di Kota Batam yang sudah berjalan, kita dapat memberikan edukasi bagaimana program menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan peranserta dalam pembangunan terutama membangun ekonomi keluarga serta persoalan sosial lainnya.

Persoalan yang ada bahwa infrastuktur dasar yang bangun itu kebanyakan berada di lingkungan masyarakat perkotaan atau yang dekat dengan dipusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial. Harapan masyarakat adanya pemerataan pembangunan fisik agar bisa langsung dipakai oleh Masyarakat sebagai mana dimuat di <https://kepri.co.id/19/01/2024/tiga-kelurahan-di-galang-usulkan-prioritas-pembangunan-fisik/>. Seperti kita ketahui bahwa Tanjung Pengapit berada Kelurahan Galang Baru berkedudukan diujung gugusan pulau rempang dan galang tepatnya dipesisir pulau Galang, belum ada akses jalan secara langsung dari pusat pemerintahan Kampung Baru menuju Tanjung Pengapit, akses yang ada melalui transpotasi laut, persoalan lain berhubungan dengan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapan akan terhambat dipasarkan jika akses pasar belum ada, tantangan lain daerah ini akan dikembangkan menjadi pusat industri dan pariwisata, yang menjadi fokus persoalan adalah penggusuran dan masalah sosial lainnya.

Sebagai tolak ukur pelaksanaan kebijakan publik terutama dibidang infrstruktur dasar bahwa implementasi kebijakan publik sebagai suatu tahapan penting dan harus dijalankan untuk mendapatkan dampak kebijakannya. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) merupakan salah satu pelayanan publik, sebagai dasar menyelenggarakan pemerintahan termasuk didalam nya kebijakan publik menjadi faktor utama praktik tata pengelolaan di Indonesia. Menurut Friedrich (dalam Nugroho, 2017: 2013) kebijakan adalah *“a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an abjective or a purpose”*. Maksudnya yaitu kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian nantinya tentang Implementasi Kebijakan Publik Pembangunan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur di Tanjung Pengapit Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam. Untuk mencapai pada tahapan kebijakan publik, implementasi kebijakan terhadap publik yang menjadi tahapan utama dan seharusnya dilalui agar pada tahap implementasi diperoleh variabel terkait dengan kesuksesan implementasi tersebut agar dapat mempermudah dalam proses revisi tahapan implementasinya (Abdussamad et al., 2022). Pendapat yang lain tentang Implementasi kebijakan publik yaitu

menurut Van Mater dan Van Horn dalam Leo Agustino adalah tindakan-tindakan yang baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2006). Untuk pembangunan Infrastruktur dasar pemerintah Kota Batam sudah memiliki program yaitu Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) yang telah di anggarkan di APBD setiap tahunnya.

Pendapat lain bahwa kebijakan publik tidak sebatas peran dan fungsi institusi negara yang terpresentasi pada ‘formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan’saja, namun juga pada relasinya dengan stakeholders kebijakan yang melibatkan peran civil society dan partai politik. (Wawan Edi Kuswandro, 2024). Adapun manfaat teoritis, kajian penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik Pembangunan masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur, sebagai mana artikel (Rorimpandey & Nurdin, 2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1–13. Dan (Febrianti et al., 2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Melalui Program SAMISADE Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ciawi. *PUBLIK Jurnal Sumber Daya Manusia, Administrasi Pelayanan Publik*. Vol.10 No. 2 – 2023. Ini sebagai perbandingan keadaan sebenarnya yang diharapkan terjadi di lapangan dengan studi kajian Teoretis yang ada dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam pembahasan pengabdian masyarakat tentang Implementasi Kebijakan Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di Tanjung Pengapit Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam, model implementasi kebijakan yang peneliti gunakan adalah model Implementasi Kebijakan dari Edward III. model dengan istilah *Direct and Indirect Impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

## **METODE**

Metode yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif. Dengan tujuan memberikan gambaran yang akurat, sistemis, dan faktual mengenai suatu fenomena di objek, Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dan berdasarkan fakta. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif tidak mengutamakan angka; melainkan, mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020: 7). Penelitian lapangan dilakukan peneliti langsung mengadakan penelitian di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan membandingkan hasil dari pengumpulan data lapangan dan data skunder dengan kajian teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1: Peta Kelurahan Galang Baru



Gambar 2: Jalan Lingkungan dan Jalan Poros





Gambar 3: Instalasi Air Bersih dan Jaringan



Gambar 4: Pelabuhan dan PASUM



Gambar 5: Fasilitas

### **Implementasi Kebijakan Publik Pembangunan Masyarakat.**

Pembangunan masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan publik diterapkan, karena pemerintah sebagai pelaksana harus menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Pemerintah memiliki peran kunci dalam merancang rencana dan kebijakan pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah. Ini mencakup infrastruktur jalan, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya. Perencanaan yang matang membantu menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Pemerintah Kota Batam sejak beberapa tahun lalu telah menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan Infrastruktur disetiap Kecamatan dan Kelurahan yang dinamakan Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) pada tahun 2023 dana anggaran infrastruktur yang sudah siap disetiap Kelurahan sebesar Rp 3 Milyar dan tahun 2024 sudah direncanakan dan dianggarkan sebanyak Rp 3,5 milyar. Program ini dibuat untuk pemerataan pembangunan dimasyarakat sesuai dengan kebutuhan disetiap kelurahan sehingga infrastruktur dasar dimasyarakat juga bias mendukung pengembangan potensi sosial dan ekonomi masyarakat. Penetapan pembangunan infrastruktur program PIK melalui pengusulan disaat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan ditetapkan dalam APBD Kota Batam.

Proses pencapaian keputusan Kebijakan publik dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan oleh Pejabat Pemerintahan, warga Negara, dan sektor swasta dalam suatu Negara, hal ini mendukung terciptanya proses pemerintahan yang lebih transparan dalam kerangka *Good Governance*. Keberhasilan implementasi kebijakan publik disebabkan oleh faktor komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, faktor-faktor ini merupakan teori atau pendapat ahli yang digunakan peneliti dalam pembahasan Implementasi Kebijakan publik Pembangunan Masyarakat keempat faktor-faktor sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi menjadi hal penting dari setiap kegiatan interaksi di lingkungan sosial dalam kehidupan tidak terkecuali komunikasi kebijakan banyak kegiatan publik yang tidak memperhatikan atau mengesampingkannya, komunikasi kebijakan publik berarti melakukan partisipasi masyarakat sejak awal dalam merencanakan menyusun kebijakan itu sendiri, sementara itu implementasi kebijakan dilakukan sosialisasi atau sekedar pemberitahuan kepada masyarakat tanpa ada keterlibatan publik dalam proses penyusunan kebijakan.

Pemerintah Kota Batam pada dasarnya telah menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Publik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pemerintah telah membuat dan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, artinya semua sudah komplit tinggal lagi implementasi kebijakannya sesuai dengan standarnya atau tidak. Khusus program pembangunan infrastruktur di Kelurahan sebagaimana programnya Percepatan infrastruktur Kelurahan (PIK) telah melakukan komunikasi yang melibatkan publik ini dapat dilihat disaat perencanaan program pemerintah melakukan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten kota semua unsur yang ada dimasyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat Tanjung Pengapit dilibatkan dalam kegiatan itu untuk menampung aspirasi, masukan tentang kemanfaatan dan kelemahan program serta kebutuhan infrastruktur dasar yang mana mesti didahulukan. Dengan cara Musrenbang dapat dipastikan bahwa program

Percepatan Infrastruktur Kelurahan telah menimplentasikan kebijakan publik pembangunan masyarakat sesuai dengan komunikasi publik.

## **2. Sumber Daya.**

bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Peran utama dalam implementasi kebijakan publik itu ketersediaan sumber daya manusia kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia merupakan hal yang penting pula dalam mendukung capaian dan sasaran insitusi organisasi, sumber daya itu menyakut aspek staf dan fasilitas di kelurahan. Dimana staf merupakan personal yang bekerja di kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan rutin sesuai dengan bidang kegiatan dan pelaksanaan program yang sudah dibuat terutama program-program yang langsung seperti Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

Fasilitas pendukung sarana dan prasarana yang diperlukan untuk implementasi kebijakan publik terutama yang berkaiatan dengan program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) telah dipersiapkan karena situasi dan kondisi wilayah dilingkup Kelurahan sudah pasti diketahui secara baik. Fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan program sudah terkoordinasi dengan baik dengan penerima setelah adanya sosialisas, keikutsertaan masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dan peduli dengan apa-apa yang dibangun dapat dipelihara, dirawat dan drawer digunakan untuk peningkatan sosial ekonomi.

Pemerintah sendiri telah mengupayakan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat agar peningkatan infrastruktur dasar dapat diraih, keberhasilan program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga publik akan dapat berperan serta secara aktif dimulai dari perencanaan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokal tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga.

## **3. Disposisi.**

Dalam pekerjaan program pemerintahan Kota Batam yang sudah dianggarkan melalui mekanisme yang ada didasari proses perencanaan sampai pada posisi pelaksanaan sudah dibuat alur kegiatan program sehingga pemegang tanggung jawab program ini sudah mendapat persetujuan diintansi kelurahan sebagai pelaksana program, tentu tetap berkerja sama dengan masyarakat dan mitra lainnya untuk memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan tepat waktu dengan hasil yang baik dan memuaskan masyarakat. Aparat/pegawai yang berwenang dalam terlaksananya Implementasi Kebijakan Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di Tanjung Pengapit Kelurahan Galang Baru telah memberikan dukungan secara penuh dan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, semua aparat kelurahan maupun pimpinan proyek kota dalam hal ini pengelola dalam program Percepatan Iinfrastruktur Kelurahan (PIK) sudah menunjukkan loyalitas yang diharapkan terhadap perintah dan menjalankan sesuai pedoman pelaksanaan serta cukup memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan lingkungan dan penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam program PIK, karena masing-masing dari pihak yang terkait dalam hal ini aparat, organisasi masyarakat maupun pemerintah daerah sudah cukup berkompeten dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka.

Kinerja aparat/staf serta stakeholder dalam pelaksanaan program PIK ini sudah dapat dikatakan optimal, aparat dalam hal ini panitia pelaksana sudah menjalankan program dari hasil pengamatan serta wawancara kami dilapangan bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat dan berterimakasih atas adanya program ini, walaupun akses jalan poros langsung untuk mencapai Tanjung Pengapit dengan pusat pemerintahan kelurahan belum ada, karena masih menggunakan transpostasi laut pada hal jaraknya sangat dekat.

#### **4. Struktur Birokrasi.**

Pemerintahan memiliki standar khusus struktur berdasarkan peraturan atau ketentuan yang sudah berlaku untuk membuat tantanan organisasi, bagan, bagian kerja dan hierarki di lembaga pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan program agar lebih teratur. Secara umum struktur birokrasi merupakan suatu bagian yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Saat ini di Kota Batam khususnya Kelurahan Galang Baru sudah ada Struktur Birokrasi yang menggambarkan tantanan dan hierarki aparatur sipil Negara sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Satandar Pelayanan Publik (SPP) sebagai pedoman pelaksanaan mengenai implementasi kebijakan program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

Dibutuhkan ketegasan dan komitmen yang baik dari pelaksana kebijakan agar program Pembangunan Infrastruktur yang dijalankan dengan PIK dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Ketepatan waktu penyelesaian program dalam Implementasi Kebijakan Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang tepatnya di Tanjung Pengapit menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan program berjalan secara baik. dari hasil pengamatan serta wawancara kami dilapangan bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat dan berterimakasih atas adanya program ini,

#### **Implementasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur.**

Pelaksanaan kebijakan publik pada pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan-kegiatan pembangunan oleh pemerintah pada umumnya berupa infrastruktur atau sarana dan prasarana yang bersifat bangunan fisik dan non fisik. Ini dilakukan supaya pembangunan masyarakat itu tidak bertumpu pada pembangunan fisik saja tapi harus bersinergi satu sama lain termasuk non fisiknya sehinga keseimbangan dalam peningkatan sumber daya yang tersedia bermanfaat untuk peningkatan sosial ekonomi. Adapun pembangunan fisik itu berupa jalan, jembatan, pasar, irigasi dan lainnya sedangkan pembangunan non fisik itu berupa saluran pasokan listrik, ketersediaan air bersih, sumber daya manusia, sosial, ekonomi pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah Kota Batam sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2009 dan direvisi dengan Perda no. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Janka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam tahun 2005 s.d. 2025 dan Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021 s.d. 2026 (Hartono Sucipto, 2018) telah merinci rencana pembangunan fisik dan non fisik. program percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) merupakan salah satu program yang ada di rencana pembangunan jangka menengah daerah, program ini dibuat untuk mempercepat penyerapan pembangunan infrastruktur dasar dimasyarakat terutama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil supaya langsung dirasakan oleh publik, maka untuk pelaksanaan program ini ditunjuk kelurahan sebagai pelaksana, ini penunjukan yang tepat sebagai pendelegasian pemerintah Kota Batam kepada bawahannya dan karena instansi kelurahan merupakan instansi yang lansung berhubungan dengan masyarakat.



Implementasi pembangunan di Tanjung Pengapit Kelurahan Galang Baru melalui Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) telah terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat hal ini dapat kami sampaikan berdasarkan peninjauan lapangan dan hasil wawancara kami dengan warga setempat bahwa tidak ada satupun masyarakat yang kami wawancarai memberikan tanggapan negatif atas pembangunan infrastruktur yang dikerjakan melalui program PIK melainkan berterimakasih atas semua pembangunan infrastruktur yang ada. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan pihak Kelurahan, bahwa pihak kelurahan telah mengerjakan program PIK di Tanjung Pengapit itu berupa semenisasi jalan lingkungan, pelabuhan, pasum dan instalasi air bersih. Sementara jalan poros yang menghubungkan Tanjung Pengapit dengan kampung baru sebagai pusat pemerintahan kelurahan Galang Baru belum termasuk dalam program PIK. Hasil wawancara kami dengan masyarakat sebagian besar dari mereka ada kekawatiran dimasa yang akan datang ada penggusuran, hal ini tidak lepas dari rencana pemerintah mengembangkan Pulau Rempang dan Galang menjadi pusat industri dan pariwisata.

### **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan publik pembangunan masyarakat melalui program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) di Tanjung Pengapit Kelurahan Galang Baru kecamatan Galang Kota Batam telah berjalan dengan baik ini didasari beberapa alasan *Pertama*; Faktor- faktor implementasi kebijakan publik yang terdiri dari Kominikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan program dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP). *Kedua*: Kondisi hasil pembangunan infrastruktur dari peninjauan peneliti di lapangan dimana pembangunan infrastruktur semenisasi jalan setapak, pelabuhan pompong, semenisasi pasum dan instalasi air bersih telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. *Ketiga*; Program yang di kelola oleh pihak kelurahan percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) diusulkan melalui musrenbang, direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Keempat*; sebagai tambahan bahwa fasilitas non fisik telah dibangun di Tanjung Pengapit seperti fasilitas pendidikan, jaringan listrik dan listrik tenaga surya. *Kelima*: jalan poros sebagai akses keluar masuk kampung yang menghubungi Tanjung Pengapit dengan Kampung Baru pusat pemerintahan telah tersambung tapi masyarakat masih menggunakan transportasi laut, karena kondisi jalan belum beraspal dan jaraknya cukup jauh sebab kita berjalan dalam bentuk lingkaran sehingga jaraknya lima kali lebih jauh dari kampung baru lewat jalur laut ke tempat tujuan.

### **SARAN**

Dari uraian dan penjelasan hasil Implementasi Kebijakan Publik dan implementasi pembangunan infrastruktur melalui program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) serta kesimpulan diatas dapat kami memberikan saran sebagai berikut:

- a. Tetaplah menjalankan program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dengan kualitas yang baik, karena program ini bisa memberikan dampak baik bagi kehidupan masyarakat terutama dibidang sosial kemasyarakatan dan peningkatan akses ekonomi serta meningkatnya kepercayaan diri di masyarakat.
- b. Jalan poros penghubung Tanjung Pengapit dengan Kampung Baru sebagai pusat Pemerintahan Kelurahan mesti mendapat perhatian lebih sebab jalan yang ada belum memberikan kecepatan waktu, karena jarak tempuh yang sangat jauh.
- c. Bisa memberikan rasa aman masyarakat terhadap pengembangan pulau Rempang dan Galang dimana pemerintah akan mengubah dua pulau ini untuk kegiatan ekonomi yang bisa menghilangkan kampungnya.

- d. Pengembangan penelitian kedepan agar menggunakan variabel di luar faktor –faktor yang sudah digunakan serta disarankan untuk melakukan perluasan wilayah penelitian agar penelitian ini tetap bisa dilaksanakan pada program pemerintah sejenis dimasa yang akan datang

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Febrianti, A. C., Iskandar, A., & Rusliandy, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Samisade Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Ciawi. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 517–529. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.685>
- Hartono Sucipto. (2018). Peraturan Walikota Batam Tentang. *Rusunawa*.
- Rorimpandey, M. C., & Nurdin, I. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). *Manajemen Pemerintahan*, 2(1), 1–8.